



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI PENDIDIKAN DI
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP**

***AUTONOMY OF EDUCATIONAL POLICY IMPLEMENTATION IN THE
DISTRICT ARJASA SUMENEP***

TESIS

Oleh

**Khairil Idaqa'
NIM 080920101007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2010



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI PENDIDIKAN
DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi
dan mencapai gelar Magister Sains (M.Si)

Oleh

Khairil Idaqa'
NIM 080920101007

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Musahwan dan Ibunda Samari tercinta yang telah berjerih payah untuk memberi motivasi, mendoakan, dan mencurahkan kasih sayangnya selama ini;
2. Adik-adikku tersayang Defri Hermawan, Siti Khalifah, Achmad Firdaus, dan Muhammad 'Ala 'Uraidhy, kalian telah memberi keceriaan dan semangat dalam hidupku. Kita adalah anugerah terindah, kebanggaan dan harapan keluarga. *"Melangkahlah lebih jauh dalam dunia ini untuk menuntut ilmu"*;
3. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam KH. Muhyiddin Abdusshomad dan keluarganya;
4. Bapak Ibu guru sejak Madrasah Diniyah Nurul Islam (NURIS) Laok Jang-Jang Arjasa Sumenep, SD sampai PT yang terhormat, beribu ucapan terimakasih kami haturkan atas ilmu yang diberikan. Nasehat dan bimbinganmu tetap tertanam dalam hati sebagai penuntun langkahku dalam menjalani hidup yang penuh warna ini;
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

...Dan tidaklah diberikan kepada kalian semua dari ilmu kecuali sedikit.

(Q.S. Al Isra' :85)*

... Orang berilmu yang sombong, akan direndahkan oleh ilmunya itu sendiri. Seperti halnya banjir menghancurkan atau merobohkan bangunan yang tinggi.**

*) Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Alquranul Karim*. Surabaya: Al-Hidayah

**) Az-Zarnuji. *Ta'limul Muta'allim*. Surabaya: Al-Hidayah

***)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Khairil Idaqa'

NIM : 080920101007

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "Implementasi Kebijakan Otonomi Pendidikan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2010

Yang menyatakan,

Khairil Idaqa'

NIM 080920101007

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI PENDIDIKAN DI
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP)**

Oleh
Khairil Idaqa'
NIM 080920101007

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP 19520727 198103 1 003

Dosen Pembimbing Anggota,

Drs. Abdul Kholiq Azhai, M.Si
NIP 19560726 198902 1 001

PENGESAHAN

Tesis berjudul "Implementasi Kebijakan Otonomi Pendidikan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep" telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 30 Juni 2010

tempat : Gedung Pascasarjana – FISIP Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Abdul Kholiq Azhai, M.Si
NIP19560726 198902 1 001

Drs. Boedijono, M.Si
NIP 19610331 198902 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi,

Prof. Dr. Kabul Santoso, M.S.
NIP 19430714 197008 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

ABSTRAK

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kebijakan yang merupakan penelitian terapan. Penelitian kebijakan ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan, maka sumber datanya adalah subyek atau aktor sebagai implementor. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian implementasi kebijakan otonomi pendidikan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi pendidikan kurang efektif. Penyebab kurang efektifnya implementasi kebijakan otonomi pendidikan adalah kurang efektifnya komunikasi, sumber-sumber, disposisi kebijakan karena juga dipengaruhi oleh faktor geografis sehingga mengakibatkan penerimaan pesan oleh pelaksana kebijakan kurang optimal, dukungan sumberdaya yang terbatas tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan, sikap dan kecenderungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang positif dan tidak konsisten dalam melaksanakan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) itu sendiri.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

The approach in this research is that policy research is applied research. This policy research focused on the analysis of policy implementation. This study aimed to find out how the implementation of policies, then the data source is the subject or actor as the executor. Then the research is the study of policy implementation at the regional autonomy Sumenep Arjasa education.

This study shows that the implementation of education policy is less effective autonomy. The cause of the lack of effective implementation of education policy autonomy applied is the lack of effective communication, resources, disposition, because the policy is also influenced by geographical faktor acceptance by causing less than optimal policy implementers, support limited resources not in accordance with national standards of education, attitude and the tendency of educators and educational staff are less positive and inconsistent in implementing school-based management application (SBM) itself.

Key word: Policy Implementation

RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Otonomi Pendidikan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep; Khairil Idaqa', 080920101007; 2010:206 halaman; Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Dan Kebijakan Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Desentralisasi pendidikan dalam rangka perbaikan mutu pendidikan sangat perlu dan mendesak merupakan suatu keniscayaan. Reformasi pendidikan mutlak bagi bangsa ini dan perlu segera diwujudkan, menyusul semakin pentingnya sektor pendidikan dijadikan prioritas utama pembangunan, dimana pembiayaan dan kewenangan menjadi fokus utama dalam reformasi pendidikan terkait dengan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah saat ini. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam hal otonomi pendidikan adalah mewujudkan organisasi pendidikan di seluruh kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, dan akuntabel, serta dapat mendorong partisipasi masyarakat. Dalam konteks otonomisasi pendidikan, pembelajaran yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan hendaknya sudah menjadikan pemerintah pada posisi sebagai fasilitator dan bukan lagi sebagai pengendali. Sehingga, pemeran utama dalam proses pembelajaran adalah guru sebagai pengajar dan siswa sebagai yang belajar. Siswa atau peserta didik hendaknya diberi hak untuk mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan pilihannya dan diperlakukan sesuai dengan potensi dan prestasinya. Urgensi desentralisasi reformulasi konsep pendidikan dan rekonstruksi fondasi pendidikan nasional, utamanya menyangkut hak-hak pendidikan masyarakat dan nilai-nilai dasar pendidikan saat ini mutlak untuk dipikirkan (*rethinking*) dan diaktualisasikan kembali. Salah satu konsepnya adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam implementasi kebijakan yang melibatkan struktur organisasi pendidikan utamanya sekolah, dilihat dari dua sudut pandang yaitu pembuat kebijakan (pemerintah) dan sekolah sebagai implementor. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan otonomi pendidikan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Dengan menggunakan model implementasi kebijakan George c. Edwards III. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pemerintah (dinas pendidikan) dalam usahanya memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan otonomi pendidikan sebagai langkah peningkatan mutu pendidikan.

Implementasi Kebijakan Otonomi Pendidikan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dengan menggunakan model Edward III tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang menunjukkan pemberian otonomi pada sekolah hanya dapat dilaksanakan pada tataran penyusunan kurikulum, penyusunan anggaran keuangan dan sarana prasarana. Sedangkan pada tataran pelaksanaan, dan unsur-unsur lain yang menjadi bagian otonomi sekolah itu sendiri tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Menurut model Edward III, penyebab kurang optimalnya implementasi kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik, dukungan sumberdaya yang terbatas, sikap dan kecenderungan pelaksana sekolah yang kurang positif serta struktur birokrasi yang kurang efektif.

Penyebab kurang optimalnya komunikasi kebijakan yaitu: pertama, kurang ditrasmisikannya secara menyeluruh kebijakan otonomi pendidikan (penerapan manajemen berbasis sekolah) kepada level tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Kedua, terjadinya distorsi dalam implementasi kebijakan otonomi pendidikan, ditandai dengan tidak konsistennya tenaga pendidik sebagai pelaksana kebijakan dengan perintah, pedoman atau juklak yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ketiga, kurang disiplin, dan kurangnya tanggungjawab pelaksana sekolah dalam melaksanakan kebijakan otonomi pendidikan (penerapan manajemen berbasis sekolah).

Indikasi dukungan sumberdaya yang terbatas, yaitu: pertama, jumlah staf dan pembagian tugas dan tanggungjawab di tingkat sekolah dasar dan menengah jelas, tetapi pengetahuan atau wawasan staf pelaksana sekolah sebagai *policy implementor* tentang apa dan bagaimana kebijakan diimplementasikan tidak dipahami secara bersama atau merata. Kedua, kurang optimalnya penyerapan informasi-informasi karena dalam sosialisai kebijakan kurang optimal dan terkesan dilaksanakan sebagai rutinitas saja. Ketiga, terbatasnya sarana-prasarana

gedung atau ruang kelas dan laboratorium fasilitas penunjang lain di sekolah, serta terbatasnya anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat sebagai wujud peran serta dari masyarakat sekitar dalam pengelolaan pendidikan. Keempat, sekolah tidak cukup leluasa dalam kebijakan perencanaan dan pengelolaan anggaran, maupun perencanaan sarana-prasarana.

Kemudian, adanya sikap dan kecenderungan dari tenaga pendidik yang kurang konsisten yaitu: pertama, dalam proses kegiatan belajar mengajar masih lebih senang memakai metode lama (ceramah) atau pola konvensional, kedua, adanya kecenderungan tenaga pendidik tidak taat atau sering meninggalkan kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

SUMMARY

Autonomy Educational Policy Implementation in Sub Arjasa Sumenep; Khairil Idaqa ', 080920101007; 2010:206 pages; Masters in Administrative Science Concentration Public Policy Department of Administration and Administrative Sciences Faculty of Social and Political Sciences, University of Jember.

Decentralization of education in order to improve the quality of education is indispensable and urgent is a must. Educational reform is absolutely necessary for this nation and soon realized, following the increasing importance of the education sector the main priorities of development, where funding and authority to be the main focus in education reform with decentralization of education in the current era of regional autonomy. The important thing to note in terms of education is to achieve autonomy in educational organizations throughout the district / city more democratic, transparent, efficient and accountable, and can encourage community participation. Autonomy In the context of education, learning occurs in educational institutions should make the government's position as a facilitator and not as a controller. Thus, the main character is a teacher in the learning process as teachers and students as learning. The student or students must be given the right to receive instruction in accordance with the choice and be treated in accordance with the potentials and achievements. Urgency to formulate the concept of decentralization of education and reconstruction of national education foundation, especially with regard to the rights of public education and values education is an absolute basis for thought (Rethinking) and rebuild. One concept of School Based Management (SBM). In the implementation of policies which involve main organizational structure of school education, viewed from two perspectives: the policy maker (government) and schools such as the executor. The purpose of this study is to identify and describe the implementation of educational autonomy in District Arjasa Sumenep. By using the model of George c. Edwards III, the implementation of development policies. The results of this research may provide information to the government (department of education) in

an effort to improve and enhance the autonomy of educational policy as a measure of educational quality.

Autonomy Educational Policy Implementation in Sub Arjasa Sumenep Edward III by using the model can not be implemented effectively. Implementation of school-based management application (MBS), which shows the granting of autonomy to the schools can only be conducted at the level of preparation of curricula, preparation of financial budgets and infrastructure. While at the level of implementation, and other elements that are part of the school autonomy alone can not be implemented optimally. According to the model of Edward III, the cause of less optimal implementation of policies that are not performing well, support for limited resources, attitudes and trends are less positive school executive and bureaucratic structures that are less effective.

Causes of less than optimal communication policy: first, lack of autonomy policy transmission overall education (school-based management application) to the level of teachers, staff and community. Second, the occurrence of distortions in the implementation of the autonomy of educational policy, marked by educators as the executor of policy inconsistency with the orders, instructions or guidelines made by the central government. Third, lack of discipline, and lack of executive responsibility in implementing the policy of school autonomy, education (school-based management applications).

Indications of support for limited resources, namely: first, the number of staff and division of tasks and responsibilities in elementary and secondary school levels is unclear, but the knowledge or insight policy school staff as implementers implementers about what and how the policies are not implemented uniformly shared or understood. Second, the absorption of less than optimal information, because in less than optimal socialization and policies implemented as a routine impressed. Third, limited infrastructure, building or classroom and laboratory facilities at other schools, and a limited budget and lack of community participation as a form of local community participation in education management. Fourth, schools are not sufficiently flexible in policy planning and budget management, and infrastructure planning.

Then, the attitude and the tendency of educators is less consistent, namely: first, in the process of teaching and learning activities are still more comfortable using the old method (lecture) or a conventional pattern, the second, the tendency of educators often do not comply or leave the teaching and learning activities in school.



PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul Implementasi Kebijakan Otonomi Pendidikan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tujuan dalam penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat penyelesaian pendidikan sarjana strata dua (S2) dan memperoleh gelar magister sains (M.Si) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu dalam kesempatan ini sudah menjadi kewajiban moral bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya dalam penyelesaian tesis ini.
2. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Sasongko, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Seluruh Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas semua bantuannya.
5. Prof. Dr. Kabul Santoso, MS selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lembaga yang pimpinnya.
7. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Arjasa Kabupaten Sumenep dan jajarannya, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Arjasa Kabupaten Sumenep dan

jajarannya, Kepala Sekolah SD Negeri Laok Jang Jang 1 Arjasa Kabupaten Sumenep dan jajarannya yang terlibat dalam penyusunan tesis ini.

8. Rekan-rekan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi '08 (Dra. Syemim Achter, Drs. Kabul Wibowo, Raden Saudia Yourdan, S.STP, Rifki Hariyadi, S.STP, Nur Wahdatul, S.Sos, Umar Sahid, Nita Riyan S.Sos, Danang Kurniawan, SE, Setya P, S.Sos, Setyo Utomo, SH, Pebdi Arisdiawan, SE dan semua rekan yang tidak dapat disebutkan satu per satu) atas bantuan dan dukungannya.
9. Sauda-saudaraku di Pondok Pesantren Nurul Islam (NURIS) Jember, terima kasih atas motivasinya selama penulisan tesis ini.
10. Saudara-saudaraku Himpunan Mahasiswa Kepulauan Kangean (HIMASISKA) Jember terima kasih atas motivasinya selama penulisan tesis ini,
11. Seseorang yang mewarnai kehidupanku (Noverta Shesariyana), hingga aku mengerti makna suatu kasih sayang. Terimakasih kau telah ajari aku bagaimana arti ketulusan dan pengorbanan, hingga aku selalu mengimpikan untuk selalu berarti buat orang lain.
12. Orang-orang yang telah memberikan kesan dan semangat untuk mampu *survive* serta memberi makna dalam perjuangan dan kehidupan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Jember, 30 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
RINGKASAN.....	ix
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
2.2 Konsepsi Dasar	21
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	22
2.4 Konsep Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik	30
2.5 Konsep Desentralisasi, dan Otonomi Pendidikan.....	36
2.6 Konsep Implementasi Kebijakan.....	49
2.7 Model Implementasi Kebijakan George Edwards III.....	54
2.7.1 Komunikasi.....	56

2.7.2 Sumber-sumber.....	61
2.7.3 Disposisi.....	66
2.7.4 Struktur birokrasi.....	67
2.8 Kerangka konseptual.....	70
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	73
3.1 Pendekatan Penelitian.....	73
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	77
3.3 Penentuan Informan Penelitian.....	78
3.4 Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	82
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	83
3.6 Teknik Analisa Data.....	86
3.7 Keabsahan Data.....	88
BAB 4. HASIL PENELITIAN.....	91
4.1 Deskripsi Dinas Pendidikan.....	91
4.2 Deskripsi SMA Negeri 1 Arjasa Sumenep.....	113
4.3 Deskripsi SMP Negeri 2 Arjasa Sumenep.....	118
4.4 Deskripsi SD Negeri Laok Jang-Jang 1 Arjasa Sumenep.....	122
4.5 Pembahasan.....	138
4.5.1 Implementasi PP Nomor 19 tahun 2005 di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.....	138
4.5.2 Komunikasi	147
4.5.3 Sumber-sumber.....	169
4.5.4 Disposisi.....	191
4.5.5 Struktur Birokrasi.....	196
BAB 5. PENUTUP.....	202
5.1 Kesimpulan.....	202
5.2 Implikasi Teoritik.....	203
5.2 Saran.....	205

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

AUTOBIOGRAFI

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Tipologi Kewenangan-kewenangan di Bidang Pendidikan yang Dapat Didesentralisasikan.....	5
1.2 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau-Pulau Menurut Administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep.....	17
2.2 Pergeseran Pola Menejemen.....	48
4.1 Pemerataan Pendidikan SD + MI.....	102
4.2 Pemerataan Pendidikan SLTP + MTs.....	103
4.3 Pemerataan Pendidikan Sekolah Menengah.....	104
4.4 Peningkatan Mutu Pendidikan.....	105
4.5 Prosentase Siswa SMU menurut Jurusan dan Kriteria di Kabupaten Sumenep Tahun 2007/2008.....	106
4.6 Gambaran SMK yang Terserap di Lapangan Kerja Kabupaten Sumenep.....	107
4.7 Efisiensi Internal SD dan MI di Kabupaten Sumenep 2007/2008.....	108
4.8 Hubungan Tahun Siswa dengan Biaya Pendidikan Di Kabupaten Sumenep Tahun 2007/2008.....	109
4.9 Efisiensi Internal SLTP dan MTs di Kabupaten Sumenep.....	109
4.10 Hubungan Tahun Siswa dengan Biaya Pendidikan di Kabupaten Sumenep Tahun 2007/2008.....	110
4.11 Efisiensi Internal SM di Kabupaten Sumenep Tahun 2007/2008.....	110
4.12 Hubungan Tahun Siswa dengan Biaya Pendidikan di Kabupaten Sumenep Tahun 2007/2008.....	111
4.13 Jumlah Staratifikasi Sekolah di Kecamatan Arjasa 2007/2008.....	113
4.14 Jumlah Guru SMA Negeri 1 Arjasa Sumenep.....	115
4.15 Jumlah Tenaga Administrasi SMA Negeri 1 Arjasa Sumenep.....	115
4.15 Perkembangan SMA Negeri 1 Arjasa Sumenep 3 Tahun terakhir.....	116
4.16 Ruangan SMA Negeri 1 Arjasa Sumenep.....	116
4.17 Alat Mesin Kantor SMA Negeri 1 Arjasa Sumenep.....	117

4.18 Susunan Keanggotaan Pengurus Komite Sma Negeri 1 Arjasa Periode 2009-201.....	117
4.19 Struktur Kurikulum & Pengaturan Beban Belajar.....	120
4.20 Ketuntasan Per Mata Pelajaran Tahun 2008-2009.....	121
4.21 Struktur Kurikulum SD Negeri Laok Jang-Jang 1 Arjasa Kabupaten Sumenep.....	123
4.22 Beban Belajar SD Negeri Laok Jang-Jang 1 Arjasa Kabupaten Sumenep.....	127
4.23 Ketuntasan Belajar SD Negeri Laok Jang-Jang 1 Arjasa Kabupaten Sumenep.....	128
4.24 Jadwal Waktu dalam Bulan dan Minggu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia.....	129
4.26 Jadwal Waktu dalam Bulan dan Minggu Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....	131
4.27 Jadwal Waktu dalam Bulan dan Minggu Mata Pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial.....	132
4.28 Jadwal Waktu dalam Bulan dan Minggu Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.....	133
4.29 Jadwal Waktu dalam Bulan dan Minggu Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.....	134
4.30 Jadwal Waktu dalam Bulan dan Minggu Mata Pelajaran Matematika...	135
4.31 Hari Efektif Sekolah, Efektif Fakultatif Dan Hari Libur Sekolah Di Provinsi Jawa Timur.....	136

DAFTAR BAGAN

	Halaman
2.1 Siklus Sematik Kebijakan Publik.....	29
2.2 Model Implementasi Kebijakan Edwards III.....	69
2.3 Model Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.....	72
3.1 Teknik Analisa Data Model Interaktif.....	87
4.1 Gap Komunikasi PP Nomor 19 tahun 2005 (Menejemen Berbasis Sekolah) di wilayah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.....	167
4.2 Komunikasi PP Nomor 19 tahun 2005 (Menejemen Berbasis Sekolah) di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Yang Efektif.....	168
4.3 Sumber-Sumber Implementasi PP Nomor 19 tahun 2005 di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.....	189
4.4 Sumber-Sumber PP Nomor 19 tahun 2005 di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Yang Efektif.....	190

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep.
- Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
- Lampiran 3: Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Lampiran 4: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

